

BAB IV

PERKEMBANGAN NATO DAN HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DI DALAM NATO PASKA RUNTUHNYA UNI SOVIET DAN PAKTA WARSAWA

Pada bab ini, terdiri dari 2 bahasan utama tentang hegemoni Amerika Serikat terhadap NATO yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan NATO paska Perang Dingin. Sub bab pertama akan menjelaskan tentang perkembangan Organisasi NATO paska Perang Dingin dan kebijakan perluasan keanggotaan NATO. pada sub bab kedua akan membahas tentang perubahan dominasi Amerika Serikat menuju ke hegemoni dengan isu terrorisme dan invasi dan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat melalui NATO untuk memperoleh legitimasi.

A. Perkembangan NATO pasca Perang Dingin

Runtuhnya tembok Berlin di tahun 1990an tidak hanya menandai berakhirnya Perang Dingin antara pihak Barat dan pihak Timur, namun juga telah melahirkan sebuah pandangan baru dalam pertahanan dan keamanan global. Persaingan Blok barat dan Blok timur yang terjadi lebih dari 30 Tahun lebih banyak menguntungkan Blok barat Hingga pada akhirnya, pertarungan sengit di antara keduanya dimenangkan oleh pihak Barat. Kemenangan pihak Barat dengan aliansi pertahanannya – *NATO* memunculkan adanya keraguan akan keberlangsungan *NATO* itu sendiri. Dasar pendirian NATO adalah ketika Eropa barat terancam akan bahaya yang berdatangan dari Uni Soviet bersama dengan

Pakta Warsawa, namun setelah runtuhnya musuh besar NATO tersebut terjadi sebuah kekosongan kekuatan dunia dan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap bangkitnya kekuatan baru yang dapat mengancam keamanan dunia. Ketakutan pada situasi tersebut mengakibatkan semakin menguatnya preseden bagi *NATO* untuk tetap bertahan dan mengisi kekosongan dalam tata keamanan dunia. Seperti yang dikemukakan Gheciu bahwa *NATO* semakin relevan bagi dunia Barat, yaitu *“while conventional dangers were declining, there was a corresponding increase in the probability of a different, multifaceted, and a hard to contain type of risk”*.⁵⁹

Berakhirnya Perang Dingin pada dasarnya juga akan mengakhiri Organisasi NATO yang dengan sukses menyelesaikan misi utamanya dalam menghadang ancaman kekuatan Blok timur terhadap Blok barat, namun NATO masih bertahan paska runtuhnya Blok timur. Pada awalnya eksistensi NATO yang masih bertahan pasca Perang Dingin mulai dipertanyakan karena dianggap kurang relevan dan bahkan Organisasi Aliansi Militer tersebut terancam bubar. Namun ditengah keraguan tersebut, NATO tetap bertahan dengan alasan historis dan kebutuhan akan pengimbangan kekuasaan melalui improvisasi baik dalam fungsi, cakupan dan dasar tujuan pebentukannya. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apa sebenarnya alasan utama NATO untuk tetap mempertahankan eksistensinya pada saat masa ‘damai’ tersebut? Bukankah dengan runtuhnya Uni Soviet menjadikan

⁵⁹ Gheciu, D. (2001). “The End of the Cold War and the Future of NATO: A Hard to Contain Type of Risk”

NATO tidak lagi mempunyai ancaman yang signifikan? Kedua pertanyaan mendasar tersebut dapat dikaji melalui dua pendekatan yang dapat menjelaskan motif dibalik eksistensi NATO setelah berakhirnya Perang Dingin.⁶⁰

- a. Pendekatan pertama dalam mengkaji motif NATO yang tetap eksis tersebut adalah pendekatan sejarah. Pendekatan ini berangkat dari asumsi dan pengalaman historis dimana kawasan Eropa merupakan kawasan yang paling *prone* untuk terjadinya perang. Dimulai dari perang yang bermotifkan agama, kekaisaran, perebutan dan penguasaan wilayah, hingga perang modern yang berbasiskan imperialisme dan fasisme dari beberapa negara. Eropa kontinental yang terbagi menjadi banyak negara-negara didalamnya sangatlah rawan akan ancaman-ancaman keamanan.
- b. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan *balancing* (penyeimbang). Meskipun kutub kekuasaan dunia tidak lagi *bipolar*, namun hal tersebut tidak menjadikan pihak Barat terlena akan situasi damai yang terjadi di kawasan Euro-Atlantis. Rusia sebagai suksesor dari pecahnya Uni Soviet tetap dinilai berpotensi menjadi salah satu ancaman paling besar dalam terjaganya stabilitas keamanan dan perdamaian di Eropa. Oleh karena itu, NATO yang pada awalnya berfungsi sebagai aliansi pertahanan militer bertransformasi menjadi penyedia stabilitas kawasan dengan menjadi kekuatan penyeimbang

Dari sinilah kekuatan Organisasi NATO semakin berkembang sebagai organisasi keamanan dunia yang bergerak di bidang militer, tetapi memang sudah lebih dari beberapa decade ini NATO membuktikan dirinya sebagai inti dari sebuah komunitas keamanan di Eropa barat dan tengah dan sebagai alat untuk mengelola konflik di dalam dan disekitar area tersebut. Secara tidak langsung NATO telah mengukuhkan diri sebagai Organisasi pertahanan tersukses sepanjang masa.

Setelah Perang Dingin, NATO seperti lahir kembali sebagai organisasi "Collective Security" yang mandatnya adalah mempunyai dua tujuan utama: untuk mendorong dialog dan kerja sama dengan mantan anggota Pakta Warsawa dan untuk "mengelola" konflik di daerah-daerah di pinggiran Eropa, seperti Balkan. Sesuai dengan tujuan pertama, NATO membentuk Dewan Kerjasama Atlantik Utara (1991; kemudian digantikan oleh Euro-Atlantic Partnership Council) untuk menyediakan forum untuk pertukaran pandangan mengenai isu-isu politik dan keamanan, serta Kemitraan untuk Perdamaian (PfP) program (1994) untuk meningkatkan keamanan Eropa dan stabilitas melalui gabungan latihan militer dengan negara NATO dan non-NATO, termasuk negara-negara pecahan Uni Soviet dan sekutunya. Hubungan kerja sama Khusus besar juga dibangun dengan dua negara PfP: Rusia dan Ukraina.⁶¹

⁶¹ North Atlantic Treaty Organization (NATO) (diakses pada tanggal 2 Maret 2012); diunduh dari, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/418982/North-Atlantic-Treaty-Organization->

Perubahan juga banyak terjadi dalam Sistem militer NATO secara fundamental berbeda dari sistem yang ada sebelum akhir Perang Dingin. Doktrin Alliance telah berubah dan pasukan militer NATO telah berkurang secara radikal karena aliansi tersebut tidak lagi mempunyai ancaman militer atau musuh dari Timur. Juga beberapa Sekutu di NATO memaksa nuklir tidak lagi ditargetkan pada negara mana pun juga siap siaga, dan tingkat kesiapan nuklir telah jauh berkurang. Selain itu, NATO berjanji pada Desember 1996 di dalamnta berisi bahwa "tidak ada niat, tidak ada rencana, dan tidak ada alasan" untuk menyebarkan senjata nuklir di wilayah anggota aliansi baru yang bergabung sebagai bagian dari proses pembesaran aliansi yang akan datang.⁶²

Ini tidak berarti melemahnya kekuatan NATO, ini menunjukkan bahwa NATO sudah tidak memiliki ancaman dari pihak manapun sehingga memutuskan untuk mengurangi persediaan nuklir sebagai langkah antisipasi penyeimbangan kekuatan dunia, terlepas dari potensi Rusia sebagai negara pecahan Uni Soviet terbesar. Langkah penurunan persenjataan nuklir ini sebagai tanda bahwa NATO tidak akan menggunakan persenjataan nuklir secara sembarangan mengingat ancaman perang sudah menurun drastis.

⁶² How NATO has changed in the post cold war era (diakses pada tanggal 16 Februari 2012); diunduh dari, <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/natousis.htm>

Selain dari penurunan penggunaan Nuklir di NATO, Beberapa langkah diambil oleh NATO sebagai bentuk tanggapan atas berakhirnya Perang Dingin, seperti :⁶³

- a. NATO tidak lagi menganggap Uni Soviet sebagai musuhnya, bahkan pewaris atas Uni Soviet terbesar Rusia beserta negara-negara pecahannya.
- b. Semua negara Blok timur komunis dipersilahkan untuk menjalin kemitraan dan bekerja sama dalam wadah PFP (Partnership for Peace).
- c. NATO tidak berusaha mengisolasi negara bekas Blok timur.
- d. Aliansi berusaha menghaspud divisi di benua Eropa.

Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa NATO ingin memperlihatkan Politik terbukanya terhadap semua negara bekas blok timur yang ingin bergabung dengan NATO dan melakukan kerja sama dalam bentuk apapun, secara tidak langsung NATO sedang melakukan ekspansi terhadap keanggotaannya, atau perluasan keanggotaan NATO sebagai bentuk keeksistensian Organisasi Pertahanan. Dan diindikasikan strategi NATO ke depan tidak hanya akan berperan aktif dalam masalah atau konflik di bagian Eropa Barat namun ke seluruh dunia Internasional, dan diindikasikan strategi NATO ke depan akan dilakukan NATO untuk mempromosikan tujuan

- **Perluasan Keanggotaan NATO**

Berakhirnya Perang Dingin tidak menyurutkan hasrat untuk menambah keanggotaan NATO, dengan masuknya Polandia, Republik Czeko dan Hungaria pada 1999. Dengan perluasan NATO ini maka perbatasannya jauh bergeser ke timur, langsung bersebelahan dengan Rusia. Masuknya Lithuania dalam NATO memberikan rasa aman baginya sesudah pemisahannya dari Uni Soviet pada 1991.⁶⁴

Perluasan NATO setelah berakhirnya Perang Dingin, sebut saja sebagai NATO baru, nampaknya mengarah pada *Euro-Atlantic collective security organization (CSO)* daripada *traditional military alliance*. Terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama lebih bersifat inklusif, artinya sebanyak mungkin negara ikut di dalamnya, sedangkan yang kedua bersifat selektif dan eksklusif. Aliansi kadang-kadang ditujukan, baik secara implisit maupun eksplisit, terhadap lawan tertentu. NATO sulit dikatakan sebagai CSO kecuali jika hampir seluruh negara Eropa diterima sebagai anggota. Tetapi kita tahu bahwa NATO tidak akan menerima keanggotaan seluruh negara Eropa. Karena itu NATO baru, sebagian bersifat aliansi tradisional, sebagian merupakan CSO. Meskipun NATO menjadi persekutuan militer terkuat di dunia, ia dapat berperan sebagai penjaga perdamaian yang terlatih, sebagaimana telah dilaksanakan di Bosnia (dalam rangka persetujuan Dayton) dan di

⁶⁴ ALAN LI, "A New 'Day After' After the End of NATO 2004" dalam *Jurnal Hubungan*

Afghanistan (setelah AS menyerang rezim Taliban yang dianggap melindungi kelompok Al Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden).⁶⁵

Proses perluasan keanggotaan NATO dapat dikategorikan menjadi dua masa yang berdasarkan kerangka waktu dan fenomena global yang menyertainya. Masa pertama terjadi selama Perang Dingin masih berlangsung, sedangkan masa kedua terjadi pada era pasca Perang Dingin. Dapat dikatakan bahwa terdapat dua klasifikasi keanggotaan NATO terkait dengan masa yang menyertainya tersebut. Klasifikasi pertama yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris yang menurut istilah Rumsfeld disebut '*the Old Europe*' yang meliputi negara-negara Eropa kontinental seperti Perancis, Belgia, Belanda, Italia, Jerman Barat dan lainnya. Negara-negara pada klasifikasi ini sarat akan muatan politis yang berideologikan demokrasi, liberalis dan pasar bebas. Sedangkan pada klasifikasi yang kedua, negara-negara tersebut dinamakan *the New Europe*, yang merupakan negara-negara eks pecahan Uni Soviet dan sedang mengalami transisi ke arah yang lebih demokratis.⁶⁶

Negara-negara anggota NATO yang masuk setelah berakhirnya Perang Dingin dimulai pada era 'first wave' yang ditandai dengan masuknya Republik Ceko, Hungaria dan Polandia menjadi anggota Aliansi pada tanggal 12 Maret 1999. Proses ini kemudian diikuti dengan era 'second wave' di tahun 2004 yang memasukkan negara-negara eks satelit Uni Soviet di wilayah Eropa Timur seperti Bulgaria,

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Mira Permatasari, "Dampak Perluasan Keanggotaan *NATO* terhadap Hubungan *NATO*-Rusia"

Rumania, Slovakia, Slovenia dan tiga negara Baltik yaitu Lithuania, Latvia dan Estonia. Menyusul di tahun 2009, Albania dan Kroasia bergabung dengan Aliansi dan kian menambah jumlah keanggotaan NATO, sehingga NATO saat ini berjumlah 28 negara. Hal ini pun tak lantas membuat NATO menutup jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk bergabung. Dengan kata lain, NATO tetap membuka peluang bagi negara-negara Eropa lainnya yang ingin bergabung. Negara-negara itu merupakan Georgia, Ukraina dan Macedonia (eks pecahan Yugoslavia).⁶⁷

Kebijakan ekspansi NATO pasca Perang Dingin berdasarkan pada *Study on Enlargement* di tahun 1995 yang mengidentifikasi kebutuhan NATO dalam memperluas dirinya. Sehingga hasilnya, NATO berhasil memformulasikan kebijakan ekspansi yang bernama *Open-Door policy*. Kebijakan ini berarti negara Eropa manapun berhak menyatakan dirinya untuk bergabung dengan NATO asalkan dapat memenuhi persyaratan yang tertera dalam kebijakan tersebut. Dengan terbukanya NATO, banyak negara-negara Eropa Timur yang bergabung. Ekspansi ini terjadi dalam tiga babak yang dimulai di tahun 1997, 2004 dan terakhir di 2009.

B. Kecenderungan Perubahan Dominasi Amerika Serikat ke Hegemoni di dalam NATO

Perang Dingin yang didalamnya terjadi banyak persaingan dan banyak menimbulkan kekacauan secara tidak langsung di dunia Internasional telah

berlangsung selama lebih dari 30 tahun itu diakhiri dengan Jatuhnya Uni Soviet bersama Pakta Warsawa yang secara resmi bubar pada tanggal 1 Juli 1991. Kekalahan Uni Soviet atas Amerika Serikat pasca Perang Dingin merupakan awal kemunculan kekuatan tunggal di dunia internasional yakni Amerika Serikat, tidak ada kekuatan yang sanggup menyaingi negara raksasa dari Blok Barat tersebut, oleh karena itu Amerika Serikat berusaha memposisikan diri sebagai negara *superpower* serta bertindak aktif dalam isu-isu dan keterlibatan di dunia internasional. Bahkan sempat terjadi pergeseran *balance of power* di dunia internasional dari Bipolar ke Unipolar dibawah kendali Amerika Serikat sebagai aktornya.

Pergeseran sistem dunia terhadap hancurnya negara super power Uni Soviet inilah yang membuat Amerika Serikat menyadari bahwa dirinyalah satu-satunya kekuatan tunggal di dunia paska Perang Dingin, peristiwa pergeseran sistem ini dijelaskan oleh Dougherty dalam bukunya *Contending theory* tentang teori sistem adalah hubungan antara variable independen dan dependen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang diantara variable tersebut bisa saling berkerja sama, saling mengikuti dan berubah tergantung pada kombinasi variabelnya. Seperti layaknya tubuh, kendaraan bermotor, dan bahkan *balance of power* adalah merupakan sistem. Ini yang coba dijelaskan dalam kasus pergeseran sistem di dunia saat Uni Soviet runtuh, diibaratkan dunia adalah sebuah kendaraan bermotor ketika busi atau karburator tidak bisa digunakan maka seluruh kendaraan akan macet dan tidak bisa digunakan dalam artian

begitupun dengan runtuhnya Uni Soviet pada perang dingin yang membawa Amerika Serikat sebagai pemenangnya tentunya akan sangat berpengaruh terhadap Amerika Serikat dan dunia itu sendiri, balance of power dunia yang dulunya dari bipolar menyempit menjadi unipolar karena munculnya kekuatan tunggal negara super power satu-satunya di dunia yaitu Amerika Serikat.

Disitulah letak titik balik Amerika Serikat sebagai negara tunggal dengan kekuatan besar mencoba memainkan perannya untuk memperluas pengaruhnya dan semakin giat dalam mengikuti segala aktifitas dunia. Disini Amerika Serikat tidak sendiri, NATO atau *North Atlantic Treaty Organization* semakin memperluas wilayahnya sampai ke Eropa Timur dan Tengah. Sampai saat inipun NATO menjadi kekuatan yang mendominasi di tataran Eropa dan Internasional. Setelah terpecahnya Uni Soviet menjadi Negara-negara kecil yang merdeka dan lebih bersababat dengan negara barat, ini biasa dilihat dari beberapa negara dari Pakta Warsawa yang bergabung dengan NATO. Dalam perkembangannya perluasan keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut tersebut merubah perbatasan NATO sehingga pangkalan militerpun meluas ke Eropa Timur dan Tengah dengan alasan menjaga keamanan anggotanya dari semua ancaman. Sejak saat itu NATO sudah tidak lagi menjadi Organisasi Pertahanan Keamanan bagi wilayah Eropa Barat namun sudah merambah ke Organisasi Pertahanan bagi dunia Internasional. Dengan perluasan keanggotaan inilah NATO dibawah dominasi Amerika Serikat mulai digunakan oleh

Amerika Serikat untuk membangun pondasi hegemoni globalnya

Perluasan keanggotaan NATO berakibat pada keterlibatan NATO terhadap permasalahan dan konflik yang semakin meluas hingga tidak hanya di kawasan Eropa namun seluruh kawasan Internasional, ini sangat menguntungkan Amerika Serikat paska Perang Dingin yang bercita-cita menjadi polisi keamanan dunia. Oleh karena itu Amerika Serikat sangat berperan penting dalam urusan keamanan dan militer di NATO, beberapa konflik di dunia yang NATO ikut serta didalamnya, Amerika Serikat maju sebagai komando militer NATO.

Mungkin akan terasa aneh ketika NATO tetap bertahan walau musuh terbesar yang menjadi alasan terbentuknya NATO itu sudah runtuh dan bubar, namun dengan beberapa pertimbangan seperti yang dijelaskan di sub bab diatas, NATO akhirnya tetap bertahan. Tidak dipungkiri campur tangan Amerika Serikat di dalam mempertahankan NATO pasti ada, bagaimana tidak sebagai suksesor, inspirator dan salah satu pencetus didirikannya NATO tersebut, Amerika Serikat sudah banyak berinvestasi di dalam organisasi tersebut, bahkan NATO merupakan salah satu kunci masuk ke gerbang dalam mendominasi wilayah Eropa dan sekitarnya. Teknologi persenjataan Amerika Serikat juga semakin berkembang pesat dengan adanya NATO, apalagi paska Perang Dingin negara-negara maju seperti Inggris, Jerman yang mulai kembali normal kembali memperkuat militernya, dengan adanya NATO tentunya negara-negara anggotanya berbagi informasi mengenai perkembangan persenjataan militer dari situlah Amerika Serikat mendapat banyak teknologi militer walaupun

Pada dasarnya Amerika Serikat paska Perang Dingin bisa dikatakan agak melunak, karena sejak berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat tidak mendapat saingan atau penantang sepadan yang dapat mengancam dominasinya terhadap dunia Internasional, namun AS tidak pernah lepas terhadap segala aktifitas dan konflik di dunia Internasional, Politik Isolasionis sudah lama ditinggalkan oleh Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II. Politik Amerika Serikat paska perang dingin yang dipimpin oleh Bill Clinton menggunakan pendekatan persuasif yang menekankan kepada kerjasama antar negara dan mengusung isu-isu *low politics*. Kebijakan Bill Clinton tersebut banyak mengundang kontroversi, banyak yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut terlalu lunak dan dapat mengurangi proses hegemoni Amerika Serikat karena tidak sesuai dengan kemampuan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dunia atau satu-satunya negara super power pada waktu itu. Namun para politikus (PNAC) di Amerika banyak mendesak Amerika untuk berbuat dan lebih lebih aktif terhadap konflik-konflik Internasional, sehingga Amerika Serikat jatuhnya tetap pada berperan aktif dalam setiap pergerakan dan aktifitas di dunia Internasional.

Seiring dengan perkembangannya Amerika Serikat dan NATO semakin solid dan tidak bisa dipisahkan, dominasi Amerika Serikat terlihat samar-samar namun tetap kuat, itu terlihat saat Dalam berbagai kasus yang dengan sengaja, Amerika Serikat melibatkan anggota NATO, kita dapat melihat bagaimana Amerika Serikat mampu

... dan sebagai motivator

dalam manuver militer NATO. Misalnya masalah Bosnia-Herzegovina. Dapat diselesaikan pada akhir tahun 1996, dengan melakukan perpaduan antara kekuatan militer NATO dengan penampilan diplomasi yang mendukung dari Richard Holbrooke. Setelah itu perang teluk, Irak dianggap oleh Amerika Serikat mengancam kepentingan AS di timur tengah oleh karena itu secara langsung AS mendeklarasikan perang terhadap Irak. Invasi Irak terhadap Kuwait itu merupakan tiket masuk bagi Amerika Serikat untuk mendominasi Timur tengah, karena dengan itu Amerika Serikat dengan alasan perdamaian dunia mencoba ikut berpartisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut, dan tidak lupa Amerika Serikat melibatkan NATO di dalamnya dan akhirnya melewati NATO, Amerika Serikat memberikan penjatuhan sanksi terhadap Saddam Husein terkait dengan Perang Teluk yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat melalui NATO, sebenarnya terlihat sangat aneh ketika NATO ikut terjun dalam konflik di Timur tengah yang pada dasarnya konflik tersebut adalah konflik Amerika Serikat dengan Iraq, namun NATO digerakkan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk legalitas tindakan AS dalam mencampuri urusan di Timur Tengah, banyak negara yang menentang tentang keberadaan dan relevansi NATO terhadap masalah Perang Teluk pada Iraq yang merupakan bentuk dominasi berlebihan Amerika Serikat terhadap NATO. namun Amerika menyangkal tindakan tersebut

Tidak hanya itu saja , Peran Amerika Serikat yang sangat menonjol dalam NATO ini juga dapat dilihat, Misalkan dalam masalah pembersihan etnis Albania di Kosovo, Amerika Serikat mendikte negara NATO, untuk melakukan serangan udara dibawah komandonya terhadap posisi strategi Yugoslavia yaitu gudang-gudang senjata anti serangan udara, pangkalan milite, dan pusat-pusat logistik. Dominasi Amerika Serikat pada awal berakhirnya perang dingin masih terasa atas NATO, itu dikarenakan Amerika Serikat pada waktu itu merasa bahwa kekuatannya masih belum ada yang bisa menandingin, jadi dominasi masih menjadi cara Amerika untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruhnya di dunia Internasional.

NATO yang merupakan organisasi yang menganut sistem consensus pada setiap pengambilan keputusan ini, yang dipimpin oleh dewan atlantik utara terdiri dari 12 negara yang mendapat kedudukan sebagai parlemen, kursi pertama dan senat, kursi kedua, yang berarti negara-negara tersebut yang memutuskan segala bentuk keputusan yang akan diambil NATO, salah satu negara yang masuk dalam posisi tersebut adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memanfaatkan posisinya tersebut untuk selalu mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil NATO, pada dasarnya Amerika Serikat menggunakan posisi tersebut untuk menenuhi segala kepentingan nasionalnya melalui NATO diatas kepentingan NATO, karena seperti kita diketahui Amerika Serikat sebagai salah satu pendiri dan yang mendukung

diberikan AS terhadap setiap pengambilan keputusan di NATO akan menjadi salah satu pertimbangan yang menjadi tolak ukur kebijakan NATO.

Pasca Perang Dingin negara-negara yang dulunya terpuruk paska perang dunia kedua kembali memperlihatkan taringnya dan mulai bangkit menjadi negara maju yang dapat diperhitungkan power-nya di kawasan Eropa seperti, Inggris, Jerman dan Belanda, Perancis juga negara Rusia yang menjadi ahli waris terbanyak dari Uni Soviet yang mulai gerah terhadap perluasan keanggotaan NATO dan dari sinilah dunia kembali dihantarkan ke sistem uni-multipolar yang sebelumnya murni unipolar yang berpusat penuh pada Amerika Serikat, karena pada dasarnya banyak negara barat yang pro dengan Amerika Serikat. Amerika menyadari hal ini dan mulai sedikit mengurangi dominasinya terhadap NATO karena akan dapat beresiko menimbulkan kekacauan terutama terhadap anggota-anggotanya yang power-nya sudah dapat diperhitungkan oleh karena itu Amerika Serikat mulai memperlihatkan kecenderungannya untuk menggunakan apa yang disebut dengan kepemimpinan dan moral atau biasa disebut dengan Hegemoni.

- **Hegemoni Amerika Serikat di dalam NATO paska runtuhnya Pakta Warsawa**

Sejalan dengan hubungan Amerika Serikat dan NATO yang selalu sejalan dalam setiap pergerakan di dunia internasional, Amerika Serikat mulai semakin memperlihatkan kecenderungan hegemoninya terhadap NATO, dan kecenderungan tersebut dibuktikan oleh Amerika Serikat saat tragedy 11 September 2001 yaitu

Pengeboman gedung kembar World Trade Center, Gedung Pentagon dan Gedung Putih, Amerika Serikat mengindikasikan bahwa pengeboman tersebut merupakan aksi Terrorisme.

a. Isu Terrorisme

Pada awal abad dua satu setelah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan seluruh planet pada 11 September 2001 di Amerika Serikat: runtuhnya gedung WTC dan Pentagon akibat serangan menggunakan pesawat yang dilakukan oleh teroris.⁶⁸ Tragedi penabrakan gedung kembar WTC oleh pesawat bajakan yang terjadi selama dua jam ini dikenal sebagai “September Kelabu”, memakan kurang lebih 3.000 korban. Akibat serangan teroris tersebut, menurut Dana Yatim Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, 189 orang tewas (termasuk para penumpang pesawat), 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania.⁶⁹ Seperti serangan ke Pearl Harbor yang memicu keterlibatan AS di Perang Dunia II, serangan 11 September memicu AS untuk melancarkan perang global melawan terorisme.

⁶⁸ Kebaruan pemaknaan atas terorisme ini bisa kita amati jika kita menyimak Time Line of Terrorist yang disusun oleh US Department of Defense. Dalam rentang waktu yang dibuat yang meliputi 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, dan 2000-2006, terdapat pergeseran kecenderungan peristiwa terorisme. Sebagai misal, sebelum era 2000-2006, hampir semua kejadian yang dirujuk sebagai kegiatan teroris tidak terkait dengan Islam maupun Timur Tengah. Namun pada era 2000-2006, kecenderungan ini berbalik 180 derajat dan hampir semuanya terkait dengan Islam dan atau Timur Tengah (lihat di http://www.army.mil/terrorism/1090_1090/index.html)

Sehari setelah tragedi *nine eleven* tersebut, Amerika Serikat yang di pimpin oleh Bush mengajukan proposal pemberlakuan Pasal V dalam NATO yang berisi :

Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.⁷⁰

Dengan persetujuan anggota NATO, maka pada tanggal 12 September 2001 Pasal V NATO diberlakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah sebagai bentuk ancaman terhadap salah satu negara anggota NATO yaitu Amerika Serikat terhadap para Terrorisme. Peristiwa *nine eleven* tersebut membuat Amerika Serikat secara otomatis mengubah sikap politiknya yang sebelumnya cenderung *defensive* (terutama pada masa Bill Clinton) berubah menjadi agresif dengan melalui kebijakan militer *preemptive attack* (serangan dini), dan melakukan tekanan politik terhadap pihak yang diduga sebagai kelompok teroris, sarang teroris, atau bahkan pihak yang dianggap mendukung gerakan terorisme. Amerika Serikat dibawah pimpinan bush memang cenderung mengandalkan kekerasan dan militer dalam menyelesaikan permasalahannya, terbukti 3 hari setelah insiden Pengeboman tersebut Bush memberikan Dialog yang berisi tentang ancamannya terhadap tindakan Terrorisme

⁷⁰ The North Atlantic Treaty (diakses pada 12 Januari 2012); diunduh dari

dan mengajak semua negara untuk melawan terorisme, dalam salah satu kalimatnya adalah *You are either with us or with terrorist*, ini membuktikan bahwa keseriusan Amerika Serikat dalam memberantas terorisme di muka bumi. Berbarengan dengan pernyataan itu, Sebagai sasaran, AS mengidentifikasi beberapa musuh: negara busuk (rogue states), senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction/WMD), organisasi teroris, dan terorisme itu sendiri. Setelah itu dunia kembali disibukkan dengan perang baru yang diberi tajuk “Perang Global Melawan Terorisme” (Global War on Terrorism/GWOT) dengan Amerika Serikat sebagai motor penggerakannya.

Terorisme yang dulunya merupakan persoalan parsial masing-masing negara berubah menjadi persoalan global yang menuntut perhatian dan keterlibatan semua negara. Terutama dalam hal ini adalah NATO, seketika Amerika Serikat membuktikan dominasinya terhadap NATO selama lebih dari 40 tahun dengan hegemoni terhadap NATO, selama perang dingin yang merupakan tujuan awal dibentuknya pakta pertahanan NATO tidak pernah sekalipun Pasal V NATO, pasal yang paling krusial dalam NATO itu digunakan, namun ketika Terorisme mengancam keamanan dan kepentingan nasional Amerika Serikat, Pasal V NATO akhirnya di gunakan untuk pertama kalinya. Merujuk pada Teori hegemoni gramsci, pada dasarnya Hegemoni tetap merujuk pada persetujuan disini Amerika Serikat sebagai negara yang dominan di NATO membuktikan hegemoninya dengan memasukan suatu isu Terorisme sebagai misi baru dan musuh baru untuk NATO

kecuali apabila anggota yang ada di dalamnya dalam teori gramsci selain

persetujuan mengatakan bahwa posisi superior dari kelompok penguasa adalah legitimate. Massa yang memberikan persetujuannya harus benar-benar menganggap bahwa kepentingan dari kelompok dominan merupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan bahwa kelompok tersebut berperan untuk mempertahankan tatanan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh semua orang. Persetujuan itu diperoleh melalui sistem dan struktur kepercayaan, nilai, norma dan praktik keseharian yang secara tidak disadari melegitimasi tatanan yang ada.

Bisa terlihat bahwa Amerika Serikat sebagai suksesor dan salah satu pendiri NATO mempunyai posisi superior yang jelas keputusan yang atau kebijakan yang dia ambil akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan Organisasi NATO, Tragedi nine eleven merupakan pukulan berat bagi Amerika Serikat dan memberikan gambaran kepada dunia Internasional juga NATO bahwa ancaman Terrorisme merupakan ancaman yang tidak main-main, oleh karena itu Amerika Serikat dengan kekuatan dominannya di NATO memasukan isu Terrorisme sebagai kepentingan bersama yang harus ditanggung oleh semua anggota NATO, Dengan pasal V NATO-lah persetujuan secara legitimate diperoleh Amerika Serikat untuk menghegemoni NATO dalam kaitannya *Global War on Terrorism* (GWOT).

Walaupun pemanfaatan pasal V NATO terlihat seperti dipaksakan, namun hal itu sama sekali tidak dipaksakan, karena pada dasarnya terrorisme sudah menjadi momok yang akan dikhawatirkan, terutama terrorisme disini dikaitkan dengan kawasan timur tengah yang kebanyakan negara-negara di kawasan tersebut cenderung

anti-barat. Tetapi tidak dipungkiri momentum hegemoni Amerika Serikat yang menjadi acuan misi baru NATO dalam tujuannya memerangi Terrorisme paska kejadian nine-eleven. Jika memang anggota NATO tidak setuju dengan pemberlakuan pasal V NATO tersebut pastinya telah terjadi perdebatan hebat, namun pemberlakuan tersebut berjalan lancar dan anggota-anggota NATO secara tidak langsung menyetujui terorisme sebagai sebuah ancaman sebagaimana isu tersebut merupakan kepentingan dan kebijakan Amerika Serikat.

Pada titik inilah terjadi perubahan dominasi Amerika Serikat terhadap NATO yang cenderung berubah menjadi hegemoni, dominasi yang berlebihan terhadap NATO mulai dikurangi namun Amerika mengarah ke hegemoni terhadap NATO yang mana merupakan kepemimpinan samar yang berbasis pada persetujuan dan consensus, yang secara tidak langsung dan otomatis NATO mengikuti kepentingan Amerika Serikat tanpa sadar, namun tetap legitimate. Dengan memasukkan Isu Terrorisme sebagai Isu yang merupakan ancaman bagi dunia terutama anggota-anggota NATO dan setelah itu Implementasi pasal V NATO merupakan puncak hegemoni Amerika Serikat terhadap NATO, tidak berhenti sampai situ beberapa Invasi dilakukan Amerika Serikat melalui NATO dalam kaitannya Global War On Terrorism (GWOT) seperti Invasi ke Afghanistan, Irak dan terakhir di Libya

b. Invasi Amerika Serikat dengan NATO ke Afghanistan

Menindak lanjuti program Amerika Serikat terkait dengan GWOT, Peristiwa nine eleven tersebut diindikasikan oleh Amerika Serikat dilakukan oleh jaringan Terrorisme Al-Qaeda yang merupakan organisasi pimpinan Osama Bin Laden dan juga sekaligus sebagai rezim yang berkuasa di Afghanistan. Pada 7 Oktober 2001, persis sebulan setelah serangan 11 September itu, pesawat-pesawat AS menjatuhkan puluhan rudal jelajah dan bom-bom yang dikendalikan laser ke sasaran-sasaran strategis di Kabul dan kota-kota lain Afghanistan.⁷¹ Yang pada akhirnya membawa NATO untuk terlibat di dalamnya, pada Desember 2001 atas permintaan Amerika Serikat, Pasukan NATO mulai memasuki ibukota Afghanistan di Kabul dalam misi pemberantasan pasukan terrorisme Taliban. Disinilah Amerika Serikat mulai menunjukkan hegemoninya terhadap NATO, secara Organisasi pertahanan dunia, NATO mempunyai tugas dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, namun keberadaannya NATO sangat tidak relevan di Afghanistan, namun karena kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk memburu kelompok terroris Taliban yang dipimpin oleh Osama Bin Laden yang diindikasikan berada di Afghanistan, disinilah NATO digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat.

⁷¹ 10 Tahun Invasi AS ke Afghanistan (diakses pada 28 Februari 2012); diunduh dari,

Dalam sejarah NATO ini merupakan misi pertamanya bergerak diluar wilayah Eropa, hegemoni Amerika Serikat kembali terbukti disini, permintaan bantuan militer untuk invasi ke Afghanistan oleh Amerika Serikat terhadap NATO'pun terlaksana. Sesuai dengan pasal V di NATO, secara suka rela NATO harus memberikan bantuan militernya dalam kaitannya perang melawan Terrorisme. Peran NATO di Afghanistan inipun tidak main-main, International Security Assistance Force (ISAF) yang awalnya dipimpin oleh PBB sebagai penetralisir invasi AS ke Afghanistan pada tahun 2003 dialihkan kepemimpinannya terhadap NATO, disini terlihat bahwa NATO memang sudah menjadi Organisasi yang kompeten dan dianggap oleh PBB sebagai Organisasi yang legitisasi dan kebijakannya dapat menjadi acuan.

Pada dasarnya terrorisme yang dikaitkan oleh kelompok Taliban di Afghanistan atas tragedi nine-eleven masih simpang siur dan tidak bisa dibuktikan dengan fakta yang jelas oleh Amerika Serikat, sejak saat itu banyak negara yang menentang dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap invasi ke Afghanistan, begitu juga keterlibatan NATO di dalamnya. NATO dianggap kelewat batas terhadap masalah invasi di Afghanistan ini karena terlihat sekali bahwa ada hegemoni Amerika Serikat di dalam Organisasi NATO. invasi ini merupakan sebuah revolusi organisasi NATO yang terlalu focus terhadap kepentingan Amerika Serikat, bahkan Mantan perdana menteri Perancis, Dominique de Villepin menyatakan bahwa NATO saat ini telah berubah menjadi alat imperialisme Amerika Serikat dan dirinya melihat NATO

sebagai sebuah bentuk kolonialisme baru, meskipun awalnya dirancang sebagai sistem pertahanan.

Selain itu Invasi yang dibalut dengan isu perang terhadap terorisme ini, sebagai sebuah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah konstelasi politik internasional. Terbukti, hal tersebut langsung berpengaruh terhadap perspektif keamanan global dan kawasan serta strategi pertahanan sejumlah negara di seluruh penjuru dunia, begitu juga dengan kawasan Eropa terutama negara-negara NATO. pasca tragedy dan penerapan pasal V NATO tersebut Eropa menjadi paranoid terhadap Terrorisme terutama kaitannya Definisi Terrorisme oleh Amerika Serikat yang dikaitkan dengan Agama islam, sehingga negara-negara Eropa menjadi defensive terhadap sesuatu yang berbau islam.

c. Invasi Amerika Serikat dengan NATO di Iraq

Tidak puas dengan invasi Afghanistan, Amerika mulai kembali memulai invasi ke negara timur tengah lainnya, yaitu ke Irak pada Maret 2003. Sejak perang teluk yang terjadi pada tahun 1990-an serta penjatuhan sanksi internasional oleh NATO terhadap presiden Iraq Saddam Hussein tidak mengulirkan pemerintahan Saddam Hussein di Iraq yang terkenal dengan diktator. Alasan Amerika Serikat dalam invasinya ke negara Irak adalah indikasi Weapon Mass Destruction (WMD) yang sedang dikembangkan oleh Irak secara sembunyi-sembunyi, laporan intelijen

tentang adanya praktik Terrorisme dan atas nama kebebasan Amerika ingin

membebaskan rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein, namun kembali Amerika Serikat tidak mempunyai bukti kuat terhadap tuduhannya khususnya WMD. Disini Amerika Serikat juga melibatkan NATO untuk membantu invasi dan pengamanan Iraq dari segala aktifitas Terrorisme, sampai akhirnya NATO berperan dalam pemulihan paska invasi dan penggulingan pemerintahan Saddam Hussein seperti pemulihan sistem militer dan pelatihan-pelatihan militer pemerintahan Irak yang baru.

Dalam kasus Invasi Amerika Serikat di Irak ini kembali Amerika Serikat memperlihatkan hegemony-nya terhadap NATO, dengan kembali mengusung isu GWOT dan ditambah indikasi WMD di Irak, Amerika Serikat bersama dengan NATO melancarkan serangan ke Irak untuk menyelesaikan tugas yang tertunda pada perang teluk terhadap pemerintahan Saddam Husein yang diindikasikan mempunyai hubungan dengan jaringan Terrorisme Internasional. Disini Amerika Serikat kembali mampu mengontrol anggota-anggota NATO untuk membantu kebijakan luar negerinya dan mensukseskan kepentingan nasional Amerika Serikat. Hegemoni Amerika Serikat juga terbukti disini, dimana diluar misi baru NATO dalam kaitannya GWOT, keterlibatan NATO di Iraq mempunyai misi menghilangkan WMD (weapon mass destruction) yang oleh AS dikait-kaitkan mempunyai hubungan dengan tragedy nine-eleven, juga ambisi AS yang ingin menggulingkan pemerintahan Saddam Husein di Iraq yang diwujudkan melalui NATO. disinilah NATO mulai kehilangan

Pada tahun 2009 setelah pergantian presiden perancis Jacques Chirac ke Nicolaz Sarkozy, Perancis kembali masuk dalam keanggotaan NATO secara resmi setelah lebih dari 40 tahun hanya menjadi sekutu NATO dan bukan anggota resmi. Perancis dibawah kendali Nicolaz Sarkozy lebih cenderung kepada Amerika Serikat, berbeda dengan sebelumnya. Dengan kembali masuknya Perancis di NATO tentunya akan membuat semakin kuat Organisasi NATO, secara power dan militer sudah tidak dipertanyakan lagi, Perancis merupakan salah satu poros utama di kawasan Eropa. Tentunya ini akan semakin membuat power NATO menjadi kuat juga dalam setiap pergerakan dan kebijakannya akan selalu menjadi acuan serta berpotensi dalam menjadi polisi keamanan dunia.

d. Invasi NATO ke Lybia

Setelah kembalinya Perancis di NATO, bentuk kesetiaan Perancis dibuktikan dengan mengirimkan pasukan udara bersama dengan Inggris atas nama Organisasi NATO menyerang negara Lybia pada tanggal 20 Maret 2011. Negara yang dipimpin oleh presiden Muammar Qaddafi tersebut dihujani rudal-rudal pesawat tempur milik NATO yang mengakibatkan banyak korban sipil juga ikut berjatuhan. Misi negara-negara barat terhadap invasi militer yang dipimpin oleh NATO tersebut merupakan pembebasan rezim Qaddafi yang memerintah Lybia lebih dari 30 tahun dan pelanggaran HAM terhadap pemberontak di Lybia atas pemerintahan Qaddafi, juga karena presiden Lybia tersebut cenderung anti-Barat. Namun analisis dari Rusia

sekutunya di Barat (NATO) akan berupaya maksimal untuk memanfaatkan kesempatan yang muncul di Libya demi mencapai ambisi-ambisi politik dan ekonominya. Ditambahkannya, Barat bermaksud mengontrol sumber-sumber energi Libya dan roda perekonomian negara itu seperti yang mereka lakukan di Irak.⁷² Agar tindakan ini terlihat seperti mendapat banyak dukungan maka Amerika dan anggota utama NATO, maka NATO digerakkan di Libya untuk ikut berperan dalam penyerangan terhadap Pasukan bawahan Presiden yang berpuluh-puluh tahun memimpin di Libya Moammar Khadafi, namun tetap pasukan NATO di Libya dikontrol oleh Amerika Serikat.⁷³ Pemerintahan Lybia yang dipimpin oleh Qadaffi tidak diam begitu saja, dan bersikeras akan tetap berkuasa. Dan akhirnya Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Khadafy, yang membuat marah Barat.

Pada dasarnya banyak negara-negara anggota NATO tidak menyetujui invasi NATO ke Lybia seperti Jerman, Prancis yang akhirnya menarik pasukannya dari Libya karena dirasa kehadiran NATO di Lybia sangat dipaksakan dan hanya

⁷² Analisis: Serangan Militer ke Libya Hanya ingin Jahar Sumber Energi (diakses pada 1 Oktober 2011); diunduh dari <http://rimanews.com/read/20110321/20988/analisis-serangan-militer-ke-libya-hanya-ingin-jarah-sumber-energi>

⁷³ Paris - Serangan-serangan udara yang dilakukan oleh Inggris, Prancis dan Amerika Serikat di wilayah Libya dikoordinasikan di sebuah pangkalan AS di Jerman, kata seorang pejabat Prancis kepada AFP Sabtu.

"Ini adalah operasi multilateral yang dikoordinasikan oleh komando AS untuk pasukan AS di Eropa yang berpangkalan di Stuttgart, Jerman," kata pejabat itu yang minta tak disebut namanya. "Prancis: Serangan Terhadap Libya Dikoordinasikan Oleh AS" (diakses pada 2 Oktober 2012); diunduh dari <http://www.berita.com/berita/250501/prancis-serangan-terhadap-libya-dikoordinasikan-oleh-as>

memenuhi kepentingan Amerika Serikat. Pada kasus ini sekilas terlihat hegemoni, namun melihat penarikan pasukan Jerman dan Perancis ada konflik dalam keputusan di NATO tentang keterlibatan NATO di Libya, kasus ini bisa juga disebut dominasi AS terhadap NATO, penarikan pasukan kedua negara anggota NATO itu memperlihatkan konflik di dalam NATO tentang keputusan invasi NATO ke Libya, terkesan ada paksaan dari AS terhadap kasus ini, namun pada dasarnya AS cenderung menghegemoni NATO dalam kasus invasi Libya. Pada dasarnya Invasi NATO ke Libya ini sangat tidak masuk akal, yang pertama Libya tidak berhubungan dengan Terrorisme jika dihubungkan dengan penerapan Pasal V NATO pasca tragedi nine-eleven, yang kedua Libya tidak menjadi ancaman bagi NATO dan berada jauh di luar kawasan Eropa. Ada beberapa kemungkinan mengapa negara-negara Barat menyerang Libya, yang pertama adalah tindakan kekerasan terhadap rakyat Libya yang memberontak (misi pembebasan), kedua diindikasikan bahwa Libya termasuk donator besar jaringan Terrorisme internasional, ketiga pemerintahan Libya dibawah kepemimpinan Muammar Qaddafi yang cenderung anti-Barat serta Sumber Daya Alam minyak yang melimpah.

Invasi ini di komando langsung oleh NATO dibawah kendali Amerika Serikat sebagai motornya. Dari sinilah terlihat bahwa hegemoni Amerika Serikat terhadap NATO memang kuat, melihat misi NATO jelas ini bukan bagian dari tujuan dan visi NATO, kebijakan dan keputusan NATO cenderung berpihak pada Amerika Serikat, dilain pihak Libya mempunyai Sumber Daya Alam minyak yang dibutuhkan oleh

... dan Eropa terutama yang masuk dalam anggota NATO. Di kasus ini juga

PBB cenderung berpihak dan melimpahkan masalah ini kepada NATO, kita mengetahui bahwa bukan hanya NATO yang dikuasai oleh Amerika Serikat, PBB merupakan salah satu produk Amerika Serikat (Hak special yang diperoleh AS di PBB yaitu Hak Veto, yang mampu mengontrol kebijakan PBB) yang terbentuk sebelum NATO, untuk itulah apa yang NATO lakukan akan sejalan dengan PBB dan begitu sebaliknya, karena ada memang hegemoni Amerika Serikat di kedua Organisasi tersebut.

Hegemoni Amerika Serikat di NATO, serta invasinya ke beberapa negara di dunia membuktikan bahwa Amerika Serikat mempunyai power baik dalam pengaruh politik dan kemampuan militer juga dalam konsep power menurut Brown bahwa power itu didefinisikan memiliki tiga komponen power yaitu power sebagai atribut. Kemudian power sebagai relationship dan power sebagai bagian dari struktur. Amerika Serikat telah mempunyai ketiga hal tersebut, Power sebagai Atribut Amerika Serikat secara personal mempunyai power yang besar hingga disebut sebagai negara super power. Power sebagai relationship atau hubungan, hubungan AS dengan negara-negara di dunia sudah tidak dipertanyakan lagi, bahkan hubungan itu sudah menjadi sebuah hegemoni (AS mengontrol negara lain tanpa paksaan), Power sebagai bagian struktur, PBB dan NATO merupakan organisasi Internasional yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia Internasional, Amerika mempunyai porsi lebih di dalam kedua Organisasi tersebut yang mempunyai wewenang dan pengaruh politiknya bisa mempengaruhi kebijakan di kedua Organisasi tersebut. Oleh karena

itu tujuan lain dari hegemoni AS di NATO adalah untuk memperkuat kekuatan yang

sempat runtuh pasca tragedy nine-eleven, istilahnya membangun kembali runtuhnya salah satu kekuatan Amerika Serikat, terutama dalam pengaruh Amerika Serikat secara global.

Dapat dilihat bahwa dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia bagaimana NATO sudah mulai melakukan ekspansi diluar wilayah Eropa dan pengaruh Organisasinya di dunia, seiring dengan perkembangan jaman perkembangan NATO menuju era keemasannya dimana NATO kedepan akan menjadi Organisasi yang kompeten dan dianggap mampu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dunia, dan bahkan mungkin secara legitimasi akan mampu menyaingi PBB. Karena di beberapa kasus tersebut PBB juga searah dengan dengan kebijakan NATO. Kecenderungan hegemoni Amerika Serikat terhadap NATO mulai terlihat, dengan isu baru yang dibawa NATO, yang secara tidak langsung isu itu dimasukan oleh Amerika Serikat, AS semakin leluasa mengontrol NATO dengan segala kekuatan kebijakan dan pengaruh tekanan yang dimiliki oleh NATO itu sendiri. Disinilah Amerika Serikat sebagai inspirator, suksesor dan komando utama di NATO mulai menjadikan NATO sebagai alat ekspansi dan legitimasi terhadap setiap kebijakan dan